

TIPOLOGI KECOTAAN KOTA PARIAMAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sains



Oleh :
SAHLINI
2009/15556

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

TIPOLOGI KEKOTAAN KOTA PARIAMAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sains



Oleh :
SAHLINI
2009/15556

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Tipologi Kekotaan Kota Pariaman

Nama : Sahlini

NIM : 2009/15556

Program Studi : Geografi

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Dedi Hermon, MP
NIP.19740924 200312 1 004

Pembimbing II



Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc
NIP. 19660822 199802 2 001

Ketua Jurusan



Dra. Yurni Suasti M.Si
NIP.19620603 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Skripsi di Depan Tim Penguji
Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Judul : Tipologi Kekotaan Kota Pariaman

Nama : Sahlini

Program Studi : Geografi

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2016

Tim Penguji :

Tanda Tangan:

1. Ketua : Dr. Dedi Hermon, MP

1.

2. Sekretaris : Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc

2.

3. Anggota : Ahyuni, ST., M.Si

3.

4. Anggota : Nofrion, S.Pd., M.Pd

4.

5. Anggota : Deded Chandra, S.Si., M.Si

5.



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI**

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25135 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHLINI
NIM/TM : 15556/2009
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

Tipologi Kekotaan Kota Pariaman

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

**Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi**

**Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001**

Saya yang menyatakan,



**SAHLINI
NIM. 15556/2009**

ABSTRAK

Sahlini (NIM. 15556), Tipologi Kekotaan Kota Pariaman. Padang: FIS UNP, 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipologi kekotaan Kota Pariaman dilihat dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, fungsi kota, struktur kota dan pola perkembangan kota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. Objek dalam penelitian adalah 4 kecamatan di Kota Pariaman yaitu Pariaman Utara, Pariaman Timur, Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan inventarisasi. Analisis data berdasarkan matematis dan rasional

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Tipologi kekotaan dilihat dari jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai tahun 2014, Kota Pariaman termasuk kota kecil, 2) Tipologi kekotaan dilihat dari kepadatan penduduk Kota Pariaman 2014, kepadatan penduduk didapatkan 3 kecamatan termasuk kepadatan rendah yaitu Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara dan 1 kecamatan termasuk kepadatan tinggi yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, 3) Tipologi kekotaan dilihat dari fungsi kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, Kota Pariaman berfungsi sebagai kota pendidikan, kota jasa dan kota wisata, 4) Tipologi kekotaan dilihat dari struktur kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, struktur ekonomi berdasarkan PDRB termasuk kota pertanian, karena sektor pertanian merupakan aktivitas ekonomi paling menonjol di Kota Pariaman, baik tahun 2004-2005 maupun tahun 2013-2014 dan 5) Tipologi kekotaan dilihat dari pola perkembangan Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, pola memanjang jaringan jalan wilayah Kecamatan Pariaman Tengah. Peningkatan luas pola ini disebabkan karena pada wilayah ini terdapat pusat pemerintahan Kota Pariaman sehingga pemusatan pembangunan sarana dan prasarana berada di wilayah ini. Selanjutnya, analisis data menemukan bahwa peningkatan lahan terbangun untuk permukiman sesuai dengan pola memanjang jaringan sungai.

Kata Kunci: tipologi, kekotaan, jumlah penduduk, perkembangan kota

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Seiring dengan itu, penulis juga tidak lupa mengirimkan sholawat serta salam kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “**Tipologi Kekotaan Kota Pariaman**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Syafri (alm) dan Ibunda Hj. Rohani, terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan ketulusan dalam mendampingi penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Dr. Dedi Hermon, MP selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc selaku pembimbing II yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ahyuni, ST., M.Si, Bapak Nofrion, S.Pd., M.Pd dan Bapak Deded Chandra, S.Si., M.Si selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibunda tercinta yang selalu ada menemani dalam susah maupun senang dan memberi kasih sayangnya kepada penulis serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan abang yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepala BPS Kota Pariaman dan staf yang telah membantu dalam penelitian ini
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai FIS UNP yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bimbingan, bantuan, dan dorongan serta amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR PETA	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan	27
C. Kerangka Konseptual	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Objek dan Subjek Penelitian	29
C. Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis	32
B. Topografi.....	36
C. Hidrologi.....	36
D. Penduduk.....	38

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan	62

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kecamatan di Kota Pariaman tahun 2015.....	29
2. Jenis Data, Sumber Data, Alat Pengumpul Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
3. Desa dan Kelurahan per Kecamatan Kota Pariaman.....	33
4. Luas Wilayah Kota Pariaman Berdasarkan Kecamatan	35
5. Topografi Kota Pariaman Berdasarkan Kecamatan	36
6. Nama Sungai dan Daerah yang Dilalui di Kota Pariaman.....	37
7. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2014	38
8. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Sebelum Otonomi Daerah tahun 1998-2002.....	41
9. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Setelah otonomi tahun 2003-2009 sebelum Pemekaran Kecamatan.....	42
10. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Setelah otonomi tahun 2010-2014 Setelah Pemekaran Kecamatan.....	42
11. Fungsi Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Pariaman tahun 1998-2014.....	43
12. Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman 2010-2014	44
13. Jumlah sarana Pendidikan Kota Pariaman Tahun 201	47
14. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2014.....	48
15. Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2014	49
16. Jumlah Sarana Pariwisata Kota Pariaman tahun 2014	50
17. PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2005 (Jutaan Rupiah)	52

18.	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2005 (Jutaan Rupiah)	53
19.	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Jutaan Rupiah)	54
20.	PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Jutaan Rupiah)	55
21.	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2005	57
22.	Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2014	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	28

DAFTAR PETA

Peta	Halaman
1. Peta Administratif Kota Pariaman	40
2. Kawasan Terbangun Kota Pariaman tahun 2005	60
3. Kawasan Terbangun Kota Pariaman tahun 2014	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat-surat Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota ditinjau dari segi yuridis administratif dapat diartikan sebagai suatu daerah tertentu dalam wilayah dimana keberadaannya diatur oleh undang-undang (peraturan tertentu), dibatasi oleh batas administrasi tertentu, berstatus sebagai kota (kota kecil, kota sedang, kota besar), berpemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya mengatur wilayahnya. Dengan demikian, semua daerah yang berada dalam batas tersebut adalah kota walaupun di beberapa bagian wilayah kota tersebut terlihat kenampakan-kenampakan pedesaan (misalnya penggunaan tanah agraris) dan sebaliknya semua daerah di luar batas-batas tersebut adalah bukan kota, walau kenyataannya diluar batas-batas tersebut terdapat kenampakan-kenampakan kota (Bakaruddin, 2012).

Tipologi desa/kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat. Semua desa dan kelurahan harus dapat digolongkan menurut karakteristik tertentu yang prioritas pengembangannya lebih potensial diarahkan pada sumber mata pencaharian yang dominan (Depdagri, 2007).

Ditinjau dari segi morfologi, yaitu kenampakan-kenampakan tertentu yang mempunyai ciri khas fisik suatu kota. Dari matra ini, maksud dari kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik: 1) tata guna lahan non agraris, tata guna lahan mana maupun residential (secara umum, *building coverage*, lebih

banyak dari pada *vegetation coverage*, 2) kepadatan rumah tinggi, 3) pola jaringan jalan yang kompleks, dalam satuan yang kompak dan relatif lebih besar dari pada satuan-satuan pemukiman di sekitarnya. Sementara itu daerah yang bersangkutan mulai terjamah fasilitas kota yang ada (Bakaruddin, 2012).

Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tumbuh dan kembangnya pembangunan suatu kota, disamping faktor-faktor lain. Jumlah penduduk yang cenderung hidup di perkotaan semakin meningkat dengan aktivitas urbanisasi yang tinggi akibat titik berat pembangunan dilaksanakan di perkotaan. Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan penduduk perkotaan sedemikian kuat, sehingga hubungan antara besarnya jumlah penduduk dan jasa pelayanan publik dalam hal ini pemberi pelayanan dan yang dilayani menjadi permasalahan.

Perkembangan kota yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota menuntut pula kebutuhan lahan yang semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya tingkat pemanfaatan lahan, seiring dengan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi, dan beragamnya tuntutan kebutuhan akan sarana dan prasarana. Intervensi penggunaan lahan kawasan pada kawasan lain yang dilakukan tanpa pertimbangan atau perencanaan yang baik akan mengganggu atau mengurangi keseimbangan kegiatan sektor-sektor pembangunan secara keseluruhan (Yunus, 2006).

Urbanisasi dari segi keberadaan kota secara individu. Pengertian urbanisasi dalam hal ini dapat meliputi dua proses yaitu pergerakan horizontal penduduk berupa mengalirnya atau perpindahan penduduk dari desa ke kota

(pengertian yang bersifat umum). Urbanisasi dapat diartikan sebagai gerakan/horizontal keruangan atau disebut juga pemekaran kota secara alami/*urbanisasi exension*. Urbanisasi sebagai gerakan horizontal keruangan pengertiannya adalah berupa perubahan-perubahan dengan fungsi dan kualitas dari pola keruangan dan pola kehidupan masyarakatnya, dalam hal ini sehingga daerah yang semula secara fisik menggambarkan daerah perdesaan, kemudian berubah fungsinya menjadi daerah perkotaan.

Di Indonesia, pada umumnya kota merupakan hasil perkembangan dari desa. Di dalam suatu kota dimungkinkan untuk adanya suatu interaksi pada lingkungan yang beraneka ragam (Warlina dalam Koestoer, et al, 2001). Keanekaragaman disini merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat kota pada setiap harinya, seperti bekerja, bersosialisasi, dan sebagainya, akan berdampak pada penentuan besar kecilnya ukuran sosial kota, disamping luas area dan jumlah penduduk. Aktivitas penduduk yang semakin beragam, intens, dan berkesinambungan antara aktivitas yang satu dengan yang lainnya dalam satu waktu menandakan bahwa suatu kota dapat dikatakan besar (metropolitan). Sedangkan kebalikannya ialah jika suatu kota tidak memiliki aktivitas yang padat dan sedikit keanekaragamannya, maka kota ini dapat dikatakan kota kecil (*infant town*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan kriteria kawasan kota sebagai berikut: 1) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 2) Kawasan perkotaan baru adalah kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan dan 3) Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kota Pariaman memiliki 4 kecamatan, dimana setiap kecamatan tersebut memiliki tipologi yang berbeda, terutama dari segi karakteristiknya. Kecamatan yang ada di Kota Pariaman dalam perkembangannya tidak sama dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, mata pencaharian di bidang pertanian dan akses terhadap fasilitas umum.

Wilayah Kota Pariaman 73,36 Km² dengan jumlah penduduk 79.073 jiwa, merupakan kota yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan Kota Padang sebagai ibukota provinsi. Namun begitu, Kota Pariaman hampir memiliki jumlah penduduk yang sama dengan kota-kota lainnya di Sumatera Barat seperti Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok serta Kota Payakumbuh. Kepadatan penduduk Kota Pariaman terlihat tidak merata di setiap Kecamatan.

Tinggi-rendahnya tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah akan langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi. Pada wilayah agraris terutama perdesaan, maka kesempatan ekonomi erat kaitannya dengan kepemilikan dan luas ke-pemilikan lahan pertanian. Semakin padat penduduk, maka semakin sempit pemilikan dan penguasaan lahan, dan berarti semakin sedikit produksi yang dapat dihasilkan per individu. Semakin padat juga berpengaruh terhadap nilai lahan, baik itu untuk keperluan pertanian

maupun pemukiman. Begitu juga dengan kesempatan penduduk untuk mengakses fasilitas perkotaan. Keberadaan fasilitas perkotaan menjadi faktor penentu sulit atau mudahnya masyarakat untuk mengakses fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tipologi Kekotaan di Kota Pariaman”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tipologi kekotaan dilihat dari jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014?
2. Bagaimanakah tipologi kekotaan dilihat dari kepadatan penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014?
3. Bagaimanakah tipologi kekotaan dilihat dari fungsi kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014?
4. Bagaimanakah tipologi kekotaan dilihat dari struktur kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014?
5. Bagaimanakah tipologi kekotaan dilihat dari pola perkembangan Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Tipologi kekotaan dilihat dari jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai tahun 2014.

2. Tipologi kekotaan dilihat dari kepadatan penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014.
3. Tipologi kekotaan dilihat dari fungsi kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014.
4. Tipologi kekotaan dilihat dari struktur kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014.
5. Tipologi kekotaan dilihat dari pola perkembangan Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Geografi FIS UNP.
2. Sebagai sumbangan informasi bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Tipologi

Tipologi secara etimologi berasal dari kata *typos* yang berarti akar dari (*the roof of*) dan kata *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu, jadi tipologi adalah pengetahuan mengenai asal usul atau karakteristik dari suatu obyek (Budiharjo, dalam Faisal, 2014). Tipologi (*typologi*) merupakan satu skema *klasifikasi*, yang merupakan hasil dari proses mentipekan (*typication*) yang mengacu pada ciri-ciri tipikal kualitas individu atau orang, benda-benda, atau peristiwa, oleh karenanya tipologi merupakan suatu kategori niskal yang mempunyai acuan empirikal. Tipologi terbagi atas beberapa bagian:

- a. Tipologi geografis (lokasi), yaitu studi tentang tipe berdasarkan dari keadaan geografis bangunan itu sendiri. Misalnya bangunan tropis, padang pasir, mediterania, tepi pantai, dan lain sebagainya.
- b. Tipologi langgam (aliran atau gaya) yaitu tipe yang meminjam suatu bangunan berdasarkan langgam yang dipakai. Misalnya: Neo klasik, Post modern, Kontemporer, Tradisional, dan lain lain.
- c. Tipologi fungsi, yaitu dilihat dari tujuan penggunaan bangunan, misalnya bangunan ibadah, perkantoran, tempat tinggal, pendidikan, industri, dan lainlain.
- d. Tipologi bentuk, merupakan pentipean terhadap statu bangunan yang berdasarkan bentuk dari bangunan itu sendiri. Tipologi bentuk ini pada dasarnya mengarah ke morfologi (Nurfansyah, 2012)

Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu, misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominant nilai-nilai budaya (Ashinda, 2014).

2. Tingkat Kekotaan

Substansi tentang urbanisasi yaitu proses modernisasi wilayah desa menjadi kota sebagai dampak dari tingkat kekotaan (kekotaan) dalam suatu wilayah (*region*) atau negara. Konsekuensinya adalah terjadi perpindahan penduduk (dengan aktifitas ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian tingkat pertumbuhan kota (*urban growth*) yang diartikan sebagai laju (*rate*) kenaikan penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional (Aryani, 2005).

Pertumbuhan kota selain disebabkan oleh urbanisasi juga dapat dipengaruhi dengan laju pembangunan suatu kota yang terencana untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal ini dimaksudkan agar kota tersebut tumbuh menurut arah dan fungsinya yang integral dengan pembangunan regional dan nasional. Pembangunan kota juga dikembangkan atas dasar spesifikasi kehidupan sosial, kemampuan ekonomi, tatanan polituk, pertahanan keamanan, fisiografi wilayahnya, dukungan dan pengaruh *hinterland* (Tarigan, 2009:123).

Berkaitan dengan karakteristik kekotaan yang ada pada sebuah desa, menurut Muta'ali (2002) dapat dibuat tipologi desa berdasarkan karakteristik kekotaannya dengan indikator kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, lahan terbangun, penduduk nonpertanian dan

fasilitas sosial ekonomi yang menghasilkan tipe kekotaan desa yaitu desa mula, desa, calon kota, kota dan kota lanjut. Sehubungan dengan tingkat kekotaan, Nelson dan Amirudin *et al* (Yunus, 2005:40-41) mengklasifikasikan wilayah berdasarkan ciri pembeda desa dan kota menjadi desa (*rural*), semi kota (*rurban*) dan kota (*urban*) yang memiliki kesamaan dengan tipe kekotaan yang dikemukakan oleh Muta'ali (2002) pada indeks kekotaan rendah, sedang dan tinggi.

Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi terjadinya proses kekotaan (Wicaksono, 2011), antara lain:

- a. Ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara desa dengan perkotaan
 - b. Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan
 - c. Terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari pertanian ke industri, utamanya bagi penduduk usia kerja di perdesaan
 - d. Lebih majunya teknologi dan infrastruktur prasarana transportasi, sehingga memudahkan terjadinya mobilitas penduduk baik yang permanen atau yang ulang alik.
 - e. Keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, utamanya aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya
- Proses urbanisasi perkotaan adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Proses pembangunan yang berlangsung relatif pesat. Karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang

bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Keadaan daerah perdesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Bagi kota yang mulai padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahunnya jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja didalam wilayahnya sehingga dirasakan menambah berat permasalahan kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan tinggal bagi kaum urban memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran (*slum area*) hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh (Suharini, 2007).

3. Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sekumpulan orang-orang yang telah lama menempati suatu daerah. Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap satu kilometer persegi. Cara menghitungnya adalah dengan membandingkan jumlah penduduk di suatu daerah dengan luas daerah yang ditempati yang disebut dengan metode aritmatika. Kepadatan arithmatik adalah jumlah penduduk rata-rata per kilometer persegi daerah tanpa memperhitungkan kualitas daerah maupun kualitas penduduk. Jenis kepadatan ini merupakan kepadatan tradisional, paling mudah perhitungannya.

Berdasarkan jumlah penduduk, Undang-Undang No 26/2007 membagi kota sebagai berikut:

- 1) Kawasan perkotaan kecil: Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.
- 2) Kawasan perkotaan sedang: Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 100.000 (seratus ribu) jiwa dan paling banyak 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- 3) Kawasan perkotaan besar: Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sedikitnya 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
- 4) Kawasan perkotaan metropolitan: Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- 5) Kawasan perkotaan megapolitan: Kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional dapat membentuk kawasan megapolitan.

b. Kepadatan Penduduk

Besarnya kepadatan penduduk yang terdapat di suatu satuan wilayah dapat di lihat dengan menggunakan rumus (Mantra, 2009) yaitu;

$$\text{Kepadatan penduduk} = \frac{\text{jumlah penduduk total}}{\text{luas wilayah}}$$

Population density atau yang lebih dikenal dengan kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau

daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi. Ciri-ciri kepadatan penduduk yang makin lama makin tinggi adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang terus berjalan dan meningkatnya jumlah pemukiman di daerah tersebut (Mantra, 2009).

Kepadatan penduduk terendah dan tertinggi kemudian dicari rentang nilai, sehingga didapat klasifikasi kepadatan penduduk rendah, kepadatan penduduk sedang, dan kepadatan penduduk tinggi (Apriani dan Asnawi, 2015)

4. Fungsi Kota

Menurut Tarigan (2005:158-159) fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pusat perdagangan, yang digunakan untuk melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani beberapa kota kecil (pusat kabupaten), melayani pusat provinsi dan pusat beberapa provinsi sekaligus
- b. Pusat pelayanan jasa baik jasa perorangan maupun jasa perusahaan
- c. Tersedianya prasarana perkotaan, seperti sistem jalan kota yang baik, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota, atau pasar
- d. Pusat penyediaan fasilitas sosial atau seperti prasarana pendidikan (universitas, akademi, SLTP, SD), prasarana kesehatan, tempat ibadah, prasarana olahraga, prasarana sosial seperti gedung pertemuan, dan lain-lain

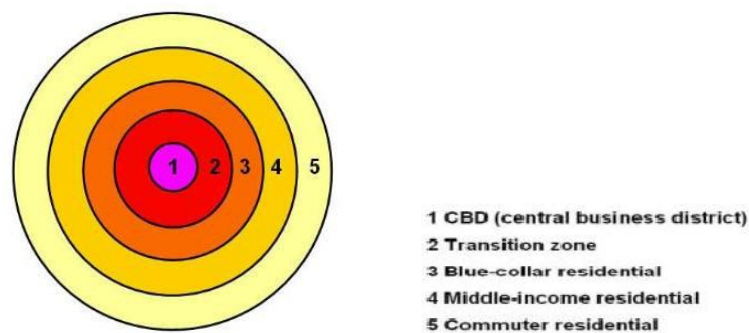
- e. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan turut mempercepat tumbuhnya suatu kota karena banyak masyarakat yang perlu datang ke tempat itu untuk urusan pemerintahan
- f. Pusat komunikasi dan transportasi
- g. Lokasi pemukiman yang tertata

5. Struktur Kota

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (UU No 26 tahun 2007). Yunus (1999) membedakan tipe struktur ruang kota dengan anggapan bahwa suatu kota tumbuh dari perkembangan aktivitas alami masyarakatnya, diantaranya :

a. Tipe Konsentris

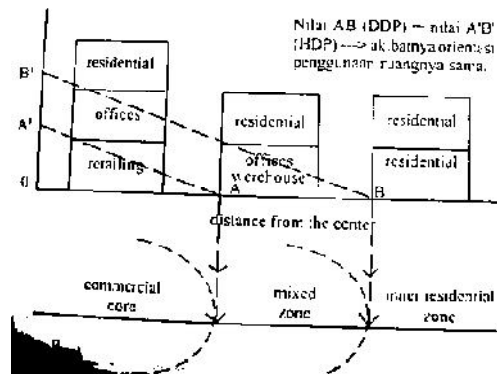
Menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris di tiap zona dan mencerminkan jenis penggunaan lahan yang berbeda.



Gambar 1 Tipe Konsentris

b. Tipe Ketinggian Bangunan

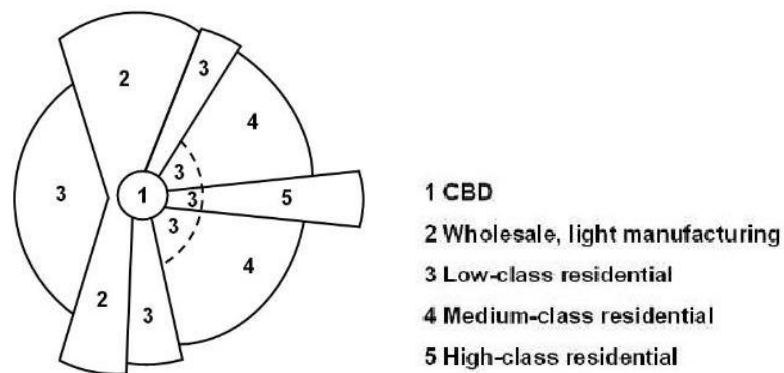
Menyatakan bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. Pertimbangan dalam penggunaan ketinggian bangunan adalah berasumsi pada nilai dan harga lahan pada pusat kota lebih tinggi dari pada di daerah pinggiran kota.



Gambar 2
Tipe Ketinggian Bangunan

c. Tipe Sektoral

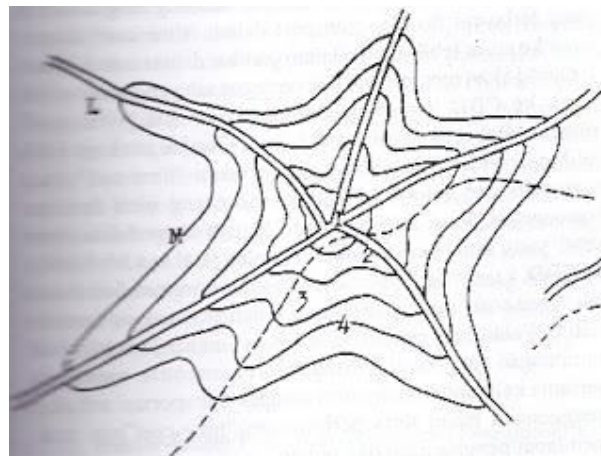
Pembentukan kota lebih dikarenakan pertimbangan kekhasan suatu lokasi, yang kemudian membentuk sektor-sektor tertentu sesuai dengan kekhasan tersebut.



Gambar 3 Tipe Sektoral

d. Tipe Poros (Babcock, 1932)

Bentuk kota dengan tipe poros ini beralasan pada adanya kecenderungan untuk lebih berkembangnya daerah-daerah dengan aksesibilitas tinggi, dengan transportasi yang memadai, dan pertimbangan antara biaya dan waktu tempuh untuk pergerakan. Tipe ini masih merujuk pada tipe konsentris dengan CBD berada sebagai pusat dan daerah di sekitarnya dihubungkan oleh transportasi yang ada.



Keterangan:

Zona 1 : Daerah Pusat Kegiatan (DPK) atau *Central Business District* (CBD).

Zona 2 : Zona peralihan
Zona 3 : Perumahan dengan pendapatan rendah atau kelas menengah ke bawah.

Zona 4 : Perumahan dengan pendapatan menengah.

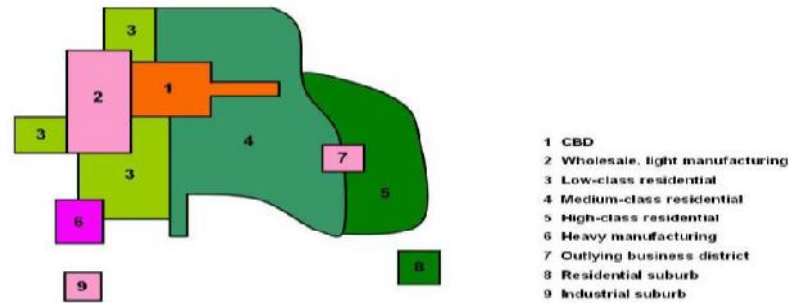
==== : Jalan utama
----- : Rel kereta api.

Gambar 4 Tipe Poros

e. Tipe *Multiple Nuclei*

Berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya, perbedaan yaitu bahwa pada Teori *Multiple Nuclei* terdapat banyak CBD dan letaknya tidak persis di tengah kota dan tidak selalu berbentuk bundar. Pada tipe ini yang menjadi

CBD tidak hanya satu CBD melainkan dapat lebih dari 2 CBD dalam sebuah kota.



Gambar 5 Tipe Multiple Nuclei

6. Perkembangan Kota

Perkembangan kota (*urban development*) dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik (Hendarto, 1997).

Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan, yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (*fringe area*). Gejala penjarangan areal kota ini disebut sebagai “invasion” dan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar disebut sebagai “*urban sprawl*” (Northam dalam Yunus, 1994).

Secara garis besar menurut Northam dalam Yunus (1994) penjararan fisik kota dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjararan fisik kota yang mempunyai sifat rata pada bagian luar, cenderung lambat dan menunjukkan morfologi kota yang kompak disebut sebagai perkembangan konsentris (*concentric development*).
- b. Penjararan fisik kota yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan penjararan yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan kota disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier (*ribbon/linear/axial development*).
- c. Penjararan fisik kota yang tidak mengikuti pola tertentu disebut sebagai perkembangan yang meloncat (*leap frog/chequer board development*).

Jenis penjararan fisik memanjang/linier yang dikemukakan oleh Northam sama dengan Teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga perkembangan fisiknya akan lebih pesat dibandingkan daerah-daerah di antara jalur transportasi.

Pola pemekaran atau ekspansi kota mengikuti jalur transportasi juga dikemukakan oleh Hoyt dalam Daldjoeni (1998), secara lengkap pola pemekaran atau ekspansi kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut:

- a. Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan transportasi ke daerah-daerah

perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau “*star shape*”.

- b. Daerah-daerah hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar.
- c. Menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti atau disebut dengan konurbasi. (Daldjoeni: 1998)

Selanjutnya berdasarkan pada kenampakan morfologi kota serta jenis penjalaran areal kota yang ada, menurut Hudson dalam Yunus (1994) mengemukakan beberapa model bentuk kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru. Bentuk ini menggambarkan kota utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya terjalin sedemikian rupa, sehingga pertalian fungsional lebih efektif dan lebih efisien.
- b. Bentuk stellar atau radial. Bentuk kota ini untuk kota yang perkembangan kotanya didominasi oleh “*ribbon development*”.
- c. Bentuk cincin, terdiri dari beberapa kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar.
- d. Bentuk linier bermanik, pertumbuhan areal-areal kota hanya terbatas di sepanjang jalan utama dan pola umumnya linier. Pada pola ini ada kesempatan untuk berkembang ke arah samping tanpa kendala fisik.
- e. Bentuk inti/kompak, merupakan bentuk perkembangan areal kota yang biasanya didominasi oleh perkembangan vertikal.
- f. Bentuk memencar, merupakan bentuk dengan kesatuan morfologi yang besar dan kompak dengan beberapa “*urban centers*”, namun masing-

masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain.

- g. Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, tentang pola-pola perkembangan fisik kota, pada dasarnya memiliki banyak persamaan. Namun secara umum pola perkembangan fisik kota dapat dibedakan menjadi perkembangan memusat, perkembangan memanjang mengikuti pola jaringan jalan dan perkembangan meloncat membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.

Dalam mengkaji perkembangan fisik suatu kota, menurut Hagget (1970) dapat mengacu pada teori difusi atau teori penyebaran/penjalaran yang mempunyai dua model yang masing-masing memiliki maksud yang berbeda. Model-model tersebut adalah model difusi ekspansi dan model difusi relokasi, dengan penjelasan berikut ini :

- a. Model difusi ekspansi (*expansion diffusion*) adalah suatu proses penyebaran informasi, material dan sebagainya yang menjalar melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lain. Dalam proses difusi ekspansi ini informasi atau material yang didifusikan tetap ada dan kadang-kadang menjadi lebih intensif di tempat asalnya. Salah satu contoh proses difusi ekspansi adalah terjadinya penambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu yang dibedakan dalam dua periode waktu. Dengan demikian dalam ekspansi ruang terdapat pertumbuhan jumlah penduduk, material dan ruang hunian baru.

- b. Model difusi yang lainnya adalah difusi relokasi (*relocation diffusion*) adalah suatu proses yang penyebaran keruangan, yaitu informasi atau material yang didifusikan meninggalkan daerah asal dan berpindah ke daerah yang baru.

Berdasarkan ketiga teori di atas, secara umum arah perkembangan kota mengikuti pola-pola tertentu, antara lain:

- a. Mengikuti pola perkembangan sepanjang jalur-jalur komunikasi, seperti jalan, sungai, pantai, dan sebagainya. Perkembangan seperti ini adalah perkembangan alamiah dan dapat dijumpai di kota-kota di seluruh Indonesia. Perkembangan kota yang mengikuti jalur transportasi ini selanjutnya akan membentuk suatu proses *conurbation* dan *agglomeration*, yaitu berdirinya bangunan-bangunan baru yang memanjang mengikuti jalur transportasi sehingga memungkinkan terjadi pertemuan *conurbation* antarkota yang berdekatan. Pertemuan antara dua *conurbation* ini disebut *agglomeration*, yakni menyatunya dua atau lebih kota yang berdekatan karena adanya perkembangan kota.
- b. Menurut pola perkembangan pusat-pusat aktivitas tertentu, misalnya sekitar pasar, sekitar universitas yang besar, sekitar terminal, dan sebagainya. Maka ada kota-kota yang perkembangannya secara historis mengikuti perkembangan ini.
- c. Mengikuti pola perkembangan dari pusat, seperti halnya kota-kota yang sudah lama perkembangannya.

Selain ketiga teori di atas, terdapat pula Teori Central Place dan Urban Base. Teori ini merupakan teori mengenai perkembangan kota yang paling populer dalam menjelaskan perkembangan kota-kota. Menurut teori *central place* seperti yang dikemukakan oleh Christaller (Daldjoeni, 1992), suatu kota berkembang sebagai akibat dari fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa untuk daerah sekitarnya. Teori *Urban Base* juga menganggap bahwa perkembangan kota ditimbulkan dari fungsinya dalam menyediakan barang kepada daerah sekitarnya juga seluruh daerah di luar batas-batas kota tersebut. Menurut teori ini, perkembangan ekspor akan secara langsung mengembangkan pendapatan kota. Disamping itu, hal tersebut akan menimbulkan pula perkembangan industri-industri yang menyediakan bahan mentah dan jasa-jasa untuk industri-industri yang memproduksi barang ekspor yang selanjutnya akan mendorong pertambahan pendapatan kota lebih lanjut (Hendarto, 1997).

Selanjutnya Bintarto (1989: 36) mengatakan bahwa kemunduran lingkungan kota yang juga dikenal dengan istilah “*Urban Environment Degradation*” pada saat ini sudah meluas di berbagai kota di dunia, sedangkan di beberapa kota di Indonesia sudah nampak adanya gejala yang membahayakan. Kemunduran atau kerusakan lingkungan kota tersebut dapat dilihat dari dua aspek:

- a. Dari aspek fisis, (*environmental degradation of physical nature*), yaitu gangguan yang ditimbulkan dari unsur-unsur alam, misalnya pencemaran air, udara dan seterusnya.

- b. Dari aspek sosial-masyarakat (*environmental degradation of societal nature*), yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusianya sendiri yang menimbulkan kehidupan yang tidak tenang, tidak nyaman dan tidak tenteram.

Di samping kenyataan tersebut, kehidupan kota yang selalu dinamis berkembang dengan segala fasilitasnya yang serba gemerlapan, lengkap dan menarik serta “menjanjikan” tetap saja menjadi suatu “*pull factor*” yang menarik orang mendatangi kota. Dengan demikian orang-orang yang akan mengadu nasib di kota harus mempunyai strategi, yaitu: bagaimana bisa memanfaatkan dan menikmati segala fasilitas yang serba menjanjikan tersebut namun juga bisa mengatasi tantangan dan permasalahan yang ada di dalamnya.

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Sarlito (1992: 46) bahwa penyebab utama terjadinya perkembangan kota adalah berkembangnya kehidupan industri di dalamnya. Konotasi “kehidupan industri” adalah dibutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Hal inilah yang banyak memberi dan mewarnai harapan orang untuk selalu mencari kehidupan di kota. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dicatat pendapat Schoori (1980), bahwa ada satu ciri sentral dari kehidupan masyarakat industri, yaitu sumber kekuatannya yang bersendi pada penemuan dan pemanfaatan sumber energi baru yang diperoleh dalam jumlah terbatas, yang memaksanya untuk melakukan pekerjaan secara besar-besaran. Makna yang terkandung dari ungkapan tersebut adalah adanya pekerjaan dalam

skala besar (*mass product*) yang tentunya membutuhkan tenaga kerja cukup banyak, dan adanya iklim persaingan yang cukup tinggi.

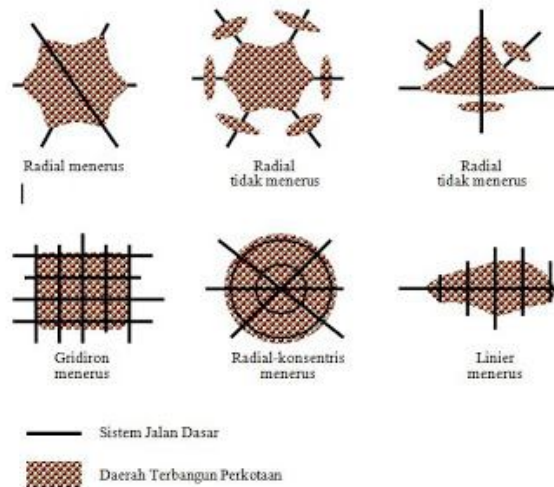
Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan, yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (*fringe area*). Gejala penjararan areal kota ini disebut sebagai “invasion” dan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar disebut sebagai “*urban sprawl*” (Northam dalam Yunus, 1994).

Jenis penjararan fisik memanjang/linier yang dikemukakan oleh Northam sama dengan Teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga perkembangan fisiknya akan lebih pesat dibandingkan daerah-daerah di antara jalur transportasi.

Pola pemekaran atau ekspansi kota mengikuti jalur transportasi juga dikemukakan oleh Hoyt dalam Daldjoeni (1998), secara lengkap pola pemekaran atau ekspansi kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut:

- a. Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau “*star shape*”.
- b. Daerah-daerah *hinterland* di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar.
- c. Menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti atau disebut dengan konurbasi.

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Northam dalam Yunus (1994), mengenai perkembangan fisik kota secara konsentris, Branch (1995) mengemukakan enam pola perkembangan fisik kota, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



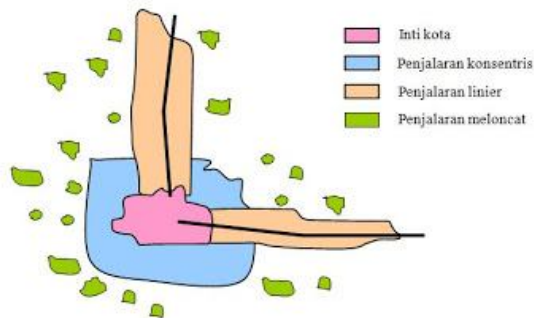
Gambar 4. Enam Pola Perkembangan Fisik Kota Menurut Branch
Sumber : Branch (1995)

Selanjutnya berdasarkan pada kenampakan morfologi kota serta jenis penjararan areal kota yang ada, menurut Hudson dalam Yunus (1994) mengemukakan beberapa model bentuk kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk satelit dan pusat-pusat baru. Bentuk ini menggambarkan kota utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya terjalin sedemikian rupa, sehingga pertalian fungsional lebih efektif dan lebih efisien.
- b. Bentuk stellar atau radial. Bentuk kota ini untuk kota yang perkembangan kotanya didominasi oleh "*ribbon development*".
- c. Bentuk cincin, terdiri dari beberapa kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar.
- d. Bentuk linier bermanik, pertumbuhan areal-areal kota hanya terbatas di sepanjang jalan utama dan pola umumnya linier. Pada pola ini ada kesempatan untuk berkembang ke arah samping tanpa kendala fisik.
- e. Bentuk inti/kompak, merupakan bentuk perkembangan areal kota yang biasanya didominasi oleh perkembangan vertikal.
- f. Bentuk memencar, merupakan bentuk dengan kesatuan morfologi yang besar dan kompak dengan beberapa "*urban centers*", namun masing-masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, tentang pola-pola perkembangan fisik kota, pada dasarnya memiliki banyak persamaan. Namun secara umum pola perkembangan fisik kota dapat dibedakan menjadi perkembangan memusat, perkembangan memanjang

mengikuti pola jaringan jalan dan perkembangan meloncat membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.



Gambar 5 . Model Penjaran Fisik Kota
Sumber: *Northam* dalam Yunus (1994)

Menurut Sujarto (1989) faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan yang bekerja pada suatu kota dapat mengembangkan dan menumbuhkan kota pada suatu arah tertentu. Ada tiga faktor utama yang sangat menentukan pola perkembangan dan pertumbuhan kota :

- a. Faktor manusia, yaitu menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota. Segi-segi perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial dan perkembangan kemampuan pengetahuan dan teknologi.
- b. Faktor kegiatan manusia, yaitu menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas.
- c. Faktor pola pergerakan, yaitu sebagai akibat dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya akan menuntut pola perhubungan antara pusat-pusat kegiatan tersebut.

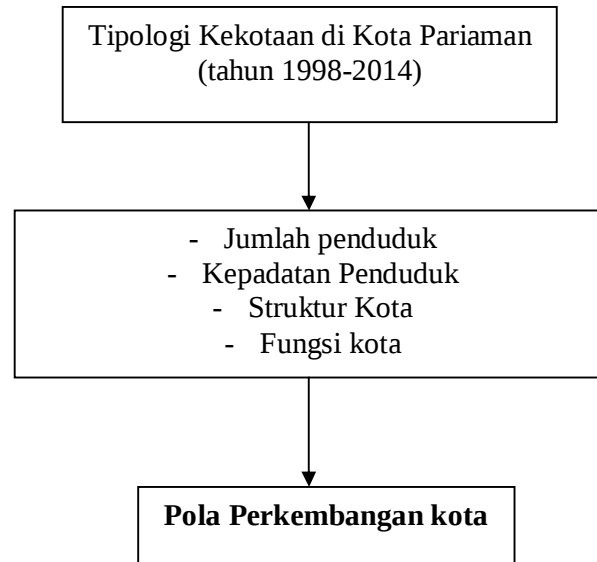
B. Kajian Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan merupakan jawaban sementara yang menunjang dalam penelitian, dimana hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian orang lain yang mendekati masalah penelitian.

Sakinah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Tingkat Kekotaan Desa Berdasarkan Struktur Ekonomi Penduduk Desa Kalibukbuk. Jurusan Pendidikan Geografi FIS Skripsi Undiskha. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) struktur ekonomi penduduk Desa Kalibukbuk adalah nonpertanian (2) tingkat kekotaan Desa Kalibukbuk berdasarkan struktur ekonomi penduduk terkategori tinggi, sehingga termasuk urban (perkotaan).

C. Kerangka Konseptual

Tingkat kekotaan suatu daerah dapat dilihat dari potensi sosial ekonomi suatu kawasan tersebut. Ukuran tingkat kekotaan, biasanya dalam konteks kependudukan, rumah tangga non pertanian dan sarana prasarana dasar pada suatu daerah. Kota Pariaman merupakan salah satu kota baru di Propinsi Sumatera Barat. Sebagai kota baru, masing-masing kecamatan di Kota Pariaman memiliki tingkat kekotaan yang berbeda sesuai dengan potensi sosial ekonomi yang dimiliki. Identifikasi ini penting dilakukan untuk mengetahui kawasan di Kota Pariaman yang termasuk daerah kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tipologi Kekotaan Berdasarkan Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk Tahun 1998-2002 (sebelum Otonomi)

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 1998-2002, saat Kota Pariaman belum menjadi otonomi sendiri dapat kita lihat dari tabel di bawah ini

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Sebelum Otonomi Daerah tahun 1998-2002

Kecamatan	Tahun				
	1998 (jiwa)	1999 (jiwa)	2000 (jiwa)	2001 (jiwa)	2002 (jiwa)
Pariaman Selatan	18.753	17.501	17.477	17.888	18.004
Pariama Tengah	30.079	30.129	29.868	30.972	31.105
Pariaman Timur					
Pariaman Utara	23.050	22.517	21.739	22.612	22.718
Jumlah	71882	70147	69084	71472	71827

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 1998-2002, BPS

Data tabel di atas terlihat jumlah penduduk Kota Pariaman sebelum menjadi otonomi daerah menjadi Kota Pariaman, tahun 1998 penduduk kota sebesar 71.882 jiwa, tahun 1999 penduduk kota sebesar 70.147 jiwa, tahun 2000 penduduk kota sebesar 69.084 jiwa, tahun 2001 sebesar 71.472 jiwa dan tahun 71.827 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Tahun 2003-2009 (setelah otonomi, sebelum pemekaran)

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada saat otonomi yaitu tahun 2003-2009, sebelum terjadinya pemekaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Setelah otonomi tahun 2003-2009 sebelum Pemekaran Kecamatan

Kecamatan	Tahun						
	2003 (jiwa)	2004 (jiwa)	2005 (jiwa)	2006 (jiwa)	2007 (jiwa)	2008 (jiwa)	2009 (jiwa)
Pariaman Selatan	19253	19501	20535	19657	19995	19959	19756
Pariama Tengah	31179	31324	32408	31978	32003	35720	35113
Pariaman Timur	0	0	0	0	0	0	0
Pariaman Utara	23150	24817	24465	23487	23654	22795	23683
Jumlah	73.456	75.406	77.006	77.201	77.480	78474	78552

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 2002-2009, BPS

Data tabel di atas terlihat jumlah penduduk Kota Pariaman setelah menjadi otonomi daerah menjadi Kota Pariaman, tahun 2003 penduduk kota sebesar 73.456 jiwa, tahun 2004 penduduk kota sebesar 75.406 jiwa, tahun 2005 berjumlah 77.006 jiwa, tahun 2006 berjumlah 77.201 jiwa, tahun 2007 berjumlah 77.480 jiwa, tahun 2008 sebesar 78.474 jiwa dan tahun 2009 sebesar 78.552 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Tahun 2010-2014

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada saat otonomi yaitu tahun 2010-2014, setelah terjadinya pemekaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 10. Jumlah Penduduk Kota Pariaman Setelah otonomi tahun 2010-2014 Setelah Pemekaran Kecamatan

Kecamatan	Tahun				
	2010 (jiwa)	2011 (jiwa)	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)
Pariaman Selatan	16161	16375	16592	17182	17524
Pariama Tengah	29180	29568	30208	29827	30028
Pariaman Timur	14968	15167	15404	15248	15346
Pariaman Utara	19344	19601	19602	20379	20712
Jumlah	79653	80711	81806	82636	83610

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka, 2010-2014, BPS

Data tabel di atas terlihat jumlah penduduk Kota Pariaman setelah menjadi otonomi daerah menjadi Kota Pariaman dan dipecah menjadi 4

kecamatan, tahun 2010 penduduk kota sebesar 79.653 jiwa, tahun 2011 penduduk kota sebesar 80.711 jiwa, tahun 2012 berjumlah 81.806 jiwa, tahun 2013 berjumlah 82.636 jiwa dan tahun 2014 sebesar 83.610 jiwa.

Jumlah penduduk Kota Pariaman selama kurun waktu 16 tahun yaitu tahun 1998-2014 berfluktuasi dan tergantung dari periode waktu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Fungsi Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Pariaman tahun 1998-2014

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Klasifikasi Kota
1998	71.882	Kota kecil
1999	70.147	Kota kecil
2000	69.084	Kota kecil
2001	71.472	Kota kecil
2002	72.399	Kota kecil
2003	73.456	Kota kecil
2004	75.406	Kota kecil
2005	77.006	Kota kecil
2006	77.201	Kota kecil
2007	77.480	Kota kecil
2008	78.474	Kota kecil
2009	78.552	Kota kecil
2010	79.653	Kota kecil
2011	80.711	Kota kecil
2012	81.806	Kota kecil
2013	82.636	Kota kecil
2014	86.610	Kota Kecil

Sumber : Kota Pariaman dalam Angka Tahun 2014, BPS

Tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk Kota Pariaman, periode pertama, sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1998-2002, jumlah penduduk Kota Pariaman tertinggi tahun 2002 sebesar 72.399 jiwa dan terendah tahun 2000 yaitu 69.084 jiwa. Berdasarkan teori perkembangan kota numerik, Kota Pariaman masih termasuk dalam kota kecil. Selanjutnya pada

periode waktu setelah otonomi dan sebelum terjadinya pemekaran kota yaitu tahun 2003-2009, penduduk Kota Pariaman berkisar antara 73.456 jiwa sampai 78.552 jiwa. Berdasarkan teori perkembangan kota numerik, Kota Pariaman mulai menjadi kota kecil pada tahun 2004, dimana jumlah penduduknya mencapai 75.406 jiwa. Selanjutnya periode ketiga yaitu pada saat terjadi pemekaran kecamatan yaitu tahun 2010-2014, penduduk Kota Pariaman berkisar antara 79.653 jiwa sampai 86.610 jiwa. Berdasarkan teori perkembangan kota numerik, Kota Pariaman masih termasuk dalam kota kecil. Dilihat dari fungsi kota, maka Kota Pariaman dari tahun 1998- 2014 termasuk kota kecil, karena memiliki jumlah penduduk sebesar 50.000 – 100.000 jiwa.

2. Tipologi Kekotaan Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Analisis kepadatan penduduk di Kota Pariaman dilakukan dengan menggunakan data jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan terbangun. Berikut adalah analisis kepadatan penduduk dapat dilihat seperti tergambar pada tabel 12 di bawah ini;

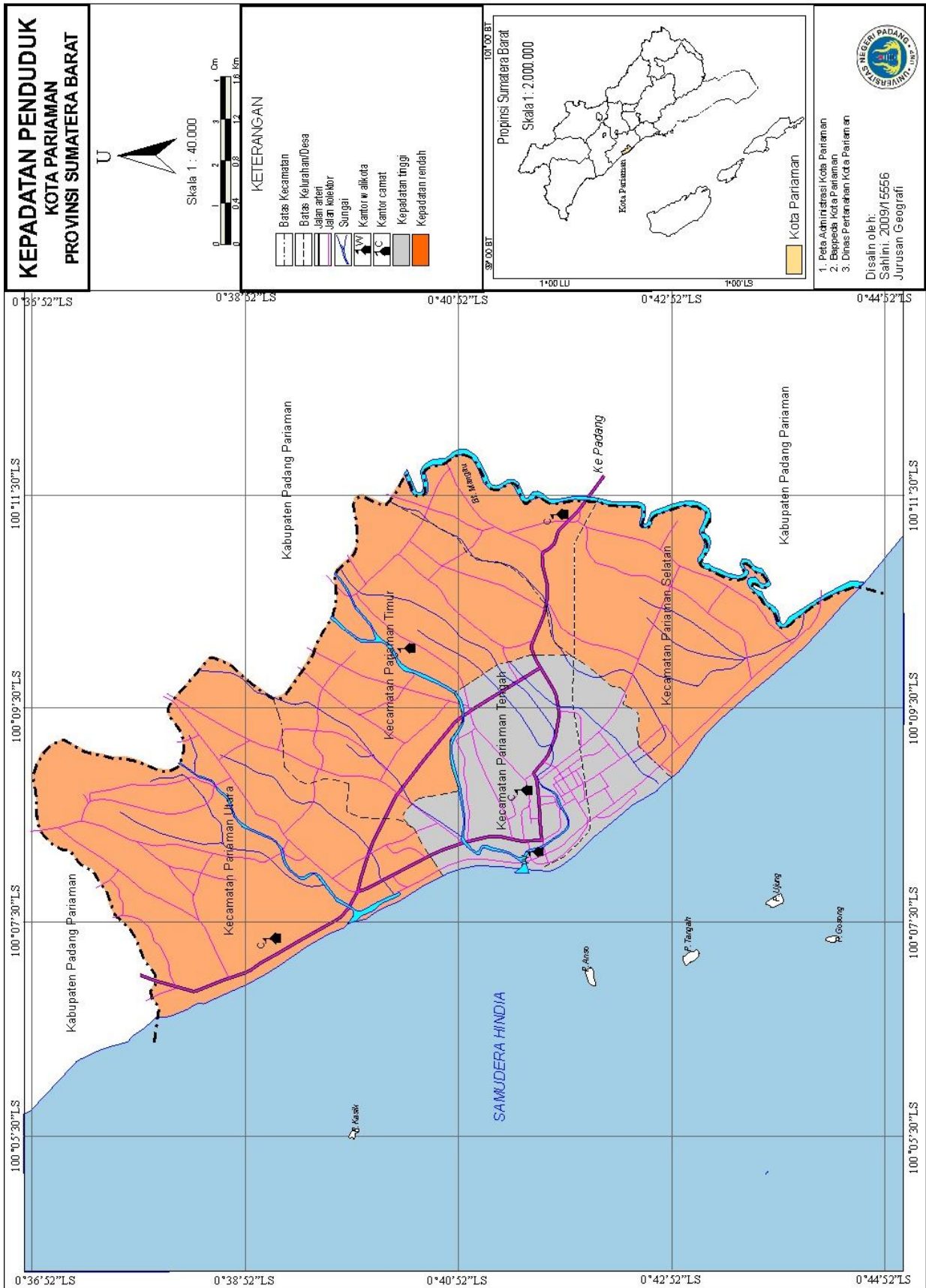
Tabel 12. Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Pariaman tahun 2014

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa)
Pariaman Selatan	23,55	17.524	744
Pariaman Tengah	15,68	30.028	1915
Pariaman Timur	16,82	15.346	912
Pariaman Utara	17,50	20.712	1120
Jumlah	73,36	83.610	1140

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2015

Berdasarkan analisis kepadatan penduduk pada tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk terendah adalah 744 jiwa/ha, sedangkan

kepadatan penduduk tertinggi adalah 1.915 jiwa/ha. Berdasarkan kepadatan penduduk terendah dan tertinggi kemudian dicari rentang nilai, sehingga didapat klasifikasi kepadatan penduduk rendah, kepadatan penduduk sedang, dan kepadatan penduduk tinggi. Analisis data terhadap kepadatan penduduk didapatkan 3 kecamatan termasuk kepadatan rendah yaitu kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara dan 1 kecamatan termasuk kepadatan tinggi yaitu Kecamatan Pariaman Tengah. Berikut adalah peta klasifikasi kepadatan penduduk.



3. Tipologi Kekotaan Berdasarkan Fungsi Kota

Sistem klasifikasi kota secara non numerik dapat di artikan sebagai penggolongan yang di dasarkan atas unsur-unsur kualitatif dari suatu kota

1) Kondisi Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan Kota Pariaman seperti tabel berikut ini:

Tabel 13. Jumlah Sarana Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2014

No	Kecamatan	SD (Unit)	SLTP (Unit)	SLTA (Unit)	Perguruan Tinggi (Unit)
1	Pariaman Selatan	13	2	1	
2	Pariaman Tengah	21	3	2	
3	Pariaman Timur	16	2	1	
4	Pariaman Utara	13	2	2	
	Jumlah	73	9	6	

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2014

Jumlah sarana Pendidikan pra Sekolah yang dimiliki Kota Pariaman pada tahun 2014, mempunyai 30 unit taman Kanak-kanak (TK). Secara keseluruhan jumlah murid TK ada sebanyak 1.172 orang, dengan jumlah kelas sebanyak 67 kelas dan diajar oleh 85 orang Guru (Pariaman dalam angka 2015, BPS).

Pada tingkat Pendidikan dasar di Kota pariaman terdapat 73 Unit Sekolah Dasar (SD) Negeri, 2 Unit SD Swasta, 2 Unit madrasah Ibtidayah Negeri serta 2 Unit madrasah Ibtidayah Sasta. Secara keseluruhan jumlah murid pada Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan dasar ini berjumlah 11.144 murid, belajar pada 517 Kelas dan diajar oleh 806 orang Guru (Pariaman dalam angka 2015, BPS).

Pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 9 Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, 2 Unit SMP Swasta, ada 3 Unit Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 5 Unit MTsN Swasta. Jumlah

murid setingkat SMP keseluruhannya ada sebanyak 6.787 orang belajar pada 227 kelas dengan jumlah Guru yang mengajar sebanyak 651 orang. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Pariaman memiliki 6 Unit Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, 1 Unit SMA Swasta, ada 1 Unit Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan 1 Unit MAN Swasta, 4 Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan 5 Unit SMK swasta. Secara keseluruhan jumlah murid setingkat SMA ada sebanyak 8.177 orang, belajar pada 282 kelas dengan jumlah Guru yang mengajar sebanyak 881 orang (Pariaman dalam angka 2015, BPS)

Berdasarkan uraian di atas maka kota Pariaman dapat dikelompokkan menjadi kota pendidikan, karena jumlah sarana prasarana pendidikan tersedia dari TK sampai SMA.

d. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan Kota Pariaman seperti tabel berikut ini:

Tabel 14. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2014

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Puskesmas (unit)	Puskel (unit)	Pustu (unit)	Klinik Swasta (unit)
		Provinsi (unit)	Swasta (unit)				
1	Pariaman Selatan	0	0	2	4	3	0
2	Pariaman Tengah	1	3	1	3	3	6
3	Pariaman Timur	0	0	2	4	4	0
4	Pariaman Utara	0	0	2	3	3	2
	Jumlah	1	3	7	14	13	8

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2014

Sarana kesehatan yang dimiliki Kota Pariaman terdiri dari, 1 Unit Rumah Sakit Umum Provinsi, 1 unit Rumah Sakit Swasta, 7 unit Puskesmas, 13 unit puskesmas pembantu, 14 unit puskesmas keliling, 8 unit klinik swasta, ada 4 unit rumah bersalin, 3 unit rumah obat, 26 unit apotek, 136 unit posyandu,

Jumlah tenaga kesehatan kota Pariaman seperti tabel berikut ini:

Tabel 15. Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2014

No	Kecamatan	Dokter (orang)	Dokter gigi (orang)	Sarjana Kesehatan Masyarakat (orang)	Sarjana Farmasi/ Apoteker (orang)	Sarjana Kesehatan (S2) (orang)	Sarjana Non Kesehatan (orang)	Bidan (PNS + PTT) (orang)	Perawat (orang)
1	Pariaman Selatan	5	2	8	7	0	1	28	21
2	Pariaman Tengah	1	0	2	3	0	2	30	7
3	Pariaman Timur	5	2	11	5	0	1	31	17
4	Pariaman Utara	5	1	7	3	1	0	30	19
5	Dinas Kesehatan	9	0	9	6	5	9	3	3
	Jumlah	25	5	37	24	6	13	122	67

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2014

Untuk melayani kesehatan penduduk, Kota Pariaman memiliki tenaga kesehatan yang terdiri dari 25 orang dokter umum, 5 orang dokter gigi, ada 37 orang sarjana kesehatan masyarakat, 6 orang sarjana kesehatan, 24 orang sarjana farmasi serta 122 orang bidan.

e. **Pariwisata**

Jumlah sarana kesehatan kota Pariaman seperti tabel berikut ini:

Tabel 16. Jumlah Sarana Pariwisata Kota Pariaman Tahun 2014

No	Kecamatan	Objek Wisata	Jenis
1	Pariaman Selatan	1. Pantai Sunur 2. Pantai Kata 3. Pulau Ujung 4. Guci Badano 5. Mesjid Tua Kurai Taji	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah
2	Pariaman Tengah	1. Pantai Gandoriah 2. Pantai Cermin 3. Pulau Angso Duo 4. Pulau Tengah 5. Pesta Budaya Tabuik 6. Kuburan Panjang 7. Meriam Kuno 8. Mesjid Tuo 9. Rumah Gadang Moh Saleh	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah Wisata Sejarah
3	Pariaman Timur	-	-
4	Pariaman Utara	1. Pantai Teluk Belibis 2. Talao Manggung 3. Pulau Kasiak 4. Penangkaran Penyu	Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Sejarah

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2014

Pada tahun 2013 jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Pariaman sebanyak 791.624 orang, kemudian meningkat menjadi 1.233.688 orang pada tahun 2014, sedangkan wisatawan asal Manca Negara yang berkunjung pada tahun 2013 sebanyak 34 orang, meningkat menjadi 73 orang pada tahun 2014.

Disebabkan letak geografis Kota Pariaman yang berbatasan dengan laut, maka wisata pantai merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke

Kota Pari-aman, disamping itu adapula wisata sejarah dan budaya seperti yang san-gat terkenal adalah budaya perayaan “ Tabuik “.

Untuk menunjang kepariwisataan, ada sejumlah tempat ako-modasi yang tersedia di Kota Pari-aman antara lain terdapat 5 unit hotel dan 4 unit penginapan. Secara keseluruhan jumlah kamar yang tersedia berjumlah sebanyak 128 kamar.

4. Tipologi Kekotaan Berdasarkan Struktur Kota

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan merupakan salah satu program penting dalam kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah, diantaranya untuk melihat nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian dan perkembangan pendapatan perkapita pada satu tahun atau satu periode pada suatu daerah. Penyajian data Produk domestik Regional Bruto (PDRB) ini didasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan perekonomian Kota Pariaman yang dilihat pada Produk domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 17. PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2005 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2004 (Rp)	%	2005 (Rp)	%
1	Pertanian	194.058,71	27.1	251.433,23	29.0
2	Penggalian	14.432,86	2.0	16.945,04	2.0
3	Industri Pengolahan	88.175,47	12.3	95.254,51	11.0
4	Listrik dan Air minum	10.823,08	1.5	12.673,43	1.5
5	Bangunan	59.437,47	8.3	70.027,60	8.1
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	81.788,22	11.4	91.087,41	10.5
7	Angkutan dan Komunikasi	87.182,57	12.2	120.204,01	13.9
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	60.393,48	8.4	70.669,09	8.2
9	Jasa-jasa	118.932,34	16.6	137.355,31	15.9
PDRB/GRDP		715.224,20		865.649,64	

Sumber : BPS Kota Pariaman (2005)

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa PDRB Kota Pariaman atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan adanya kenaikan PDRB Kota Pariaman dari Rp 715,22 milyar pada tahun 2004 menjadi Rp 865,65 milyar pada tahun 2005. Perkembangan perekonomian Kota Pariaman pada tahun 2005 ini yaitu sebesar 4,87%. Sumbangan lapangan usaha terbesar bagi perekonomian di Kota Pariaman terdapat pada sektor pertanian, yaitu sebesar Rp 251,43 milyar pada tahun 2005 dimana terdapat peningkatan sebanyak Rp 57,38 milyar sejak tahun 2004. Selanjutnya penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian di Kota Pariaman terdapat pada sektor jasa, disusul sektor angkutan dan komunikasi. Secara umum, PDRB Kota Pariaman atas dasar harga berlaku sejak tahun 2000-2005 mengalami peningkatan yang positif, artinya terjadi pertumbuhan perekonomian yang cukup signifikan dan masing-masing sektor memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian di Kota Pariaman.

Tabel 18. PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2005 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2004 (Rp)	%	2005 (Rp)	%
1	Pertanian	153438	28.6	162709.2	29.0
2	Penggalian	9704.95	1.8	10315.63	1.8
3	Industri Pengolahan	68957.2	12.9	71123.52	12.7
4	Listrik dan Air minum	6292.67	1.2	6759.28	1.2
5	Bangunan	42268.7	7.9	45359.19	8.1
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	62272.6	11.6	65482.83	11.7
7	Angkutan dan Komunikasi	62735	11.7	64924.96	11.6
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	43618.4	8.1	45676.09	8.1
9	Jasa-jasa	86520.3	16.1	89561.73	15.9
PDRB/GRDP		535807	100.0	561912.4	100

Sumber : BPS Kota Pariaman (2005)

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman atas dasar harga konstan pada tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2004 sumbangan PDRB sebesar Rp 153,44 milyar menjadi Rp 162,71 milyar pada tahun 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp 9,27 milyar. Menurut hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan ini, penyumbang terbesar juga terdapat pada sektor pertanian, sama halnya dengan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perekonomian di Kota Pariaman selalu mengalami peningkatan yang positif, artinya tidak terdapat adanya inflasi dengan peningkatan perekonomian sebesar 4,87% (2005).

Tabel 19 PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013 (Rp)	%	2014 (Rp)	%
1	Pertanian	619.469,48	20,50	706.685,98	20,78
2	Penggalian	63.908,84	2,11	73.373,20	2,15
3	Industri Pengolahan	254.751,49	8,43	273.826,17	8,05
4	Listrik dan Air minum	1.193,55	0,04	1.365,61	0,04
5	Bangunan	410.984,56	13,60	469.657,60	13,81
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	448.925,72	14,85	486.872,39	14,31
7	Angkutan dan Komunikasi	381.884,75	12,64	439.064,22	12,91
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	94.147,03	6,64	105.139,49	6,84
9	Jasa-jasa	189.475,38	6,27	206.107,74	6,06
PDRB/GRDP		3.022.080,94		3.401.254,82	

Sumber : BPS Kota Pariaman (2014)

Berdasarkan Tabel 19 dapat diketahui bahwa PDRB Kota Pariaman atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan adanya kenaikan PDRB Kota Pariaman dari Rp 3.022.080,94 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 3.401.254,82 milyar pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2014 sebesar 5,99%, angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang sebesar Rp 2.586.702,68 pada tahun 2013 menjadi Rp 2.741.739 pada tahun 2014. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2013 telah mencapai Rp 3.401.254,82 , nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 3.022.080,94.

Perekonomian Kota Pariaman tahun 2014 terdapat 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10% dalam pembentukan nilai tambah bruto, secara berurutan yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,78%, kedua kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,31%, ketiga kategori lapangan usaha kontruksi sebesar 13,8%, dan keempat kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,91%. Sementara itu, terdapat 13 kategori lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bruto dibawah 10%.

Pendapatan Perkapita Kota Pariaman atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp 36,57 per kapita per tahun pada tahun 2013 menjadi Rp 40,68 per kapita per tahun pada tahun 2014.

Tabel 20. PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013 (Rp)	%	2014 (Rp)	%
1	Pertanian	512.094,38	19,80	539.206,16	19,67
2	Penggalian	53.370,91	2,07	54.671,19	1,99
3	Industri Pengolahan	227.965,84	8,94	238.037,80	8,68
4	Listrik dan Air minum	1.216,23	0,05	1.239,05	0,05
5	Bangunan	344.899,14	13,33	368.861,55	13,45
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	403.389,33	15,59	426.329,99	15,55
7	Angkutan dan Komunikasi	322.827,67	12,48	345.828,27	12,61
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	193.879,58	3,11	215.530,81	3,09
9	Jasa-jasa	151.851,45	5,87	154.572,09	5,64
PDRB/GRDP		2.586.702,68		2.741.739,11	

Sumber : BPS Kota Pariaman (2014)

Berdasarkan Tabel 20 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kota Pariaman atas dasar harga konstan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2013 sumbangan PDRB sebesar Rp 2.586.702,68 milyar menjadi Rp 2.741.739,11 milyar pada tahun 2014. Menurut hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan ini, penyumbang terbesar juga terdapat pada sektor pertanian, sama halnya dengan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman dari struktur ekonomi termasuk kota pertanian, karena sektor pertanian merupakan aktivitas ekonomi paling menonjol di Kota Pariaman, baik tahun 2004-2005 maupun tahun 2013-2014.

5. Tipologi Kekotaan Berdasarkan Pola Perkembangan Kota Kawasan Terbangun

Kota Pariaman adalah kota yang mengalami perubahan fisik yang pesat. Penggunaan lahan terus mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, dengan kecenderungan penambahan pemukiman dan kawasan industri dan pengurangan lahan persawahan. Pemukiman baru lebih berkembang mengikuti jalan karena masyarakat lebih senang jika memiliki rumah atau bangunan dekat dengan jalan sehingga aksesibilitasnya menjadi mudah. Selain itu, rumah atau bangunan yang berada di sepanjang jalan akan lebih cocok untuk membuka usaha.

Berikut ini adalah analisis pemaparan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan di Kota Pariaman pada tahun 2005 dan tahun 2014.

- 1) Pada tahun 2005 penggunaan lahan di Kota Pariaman secara umum adalah sawah, pekarangan + bangunan, dan lainnya dengan luas lahan sebagai berikut :

Tabel 21. Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2005

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Permukiman	1.140
2	Sawah	2.648
3	Kebun Rakyat	967
4	Kebun Campuran	2.023
5	Semak	55
6	Hutan Sejenis	17

Sumber : Dinas Pertanian Kota Pariaman, 2005

- 2) Pada tahun 2014 penggunaan lahan di Kota Pariaman secara umum adalah sawah, pekarangan + bangunan, dan lainnya dengan luas lahan sebagai berikut :

Tabel 22. Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Permukiman	1.474,40
2	Sawah	1.907,49
3	Kebun Rakyat	667
4	Kebun Campuran	2.725,17
5	Semak	107,52
6	Hutan Sejenis	12

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2014

Berdasarkan informasi di atas dapat dilakukan analisi sebagai berikut :

- 1) Penggunaan Lahan Persawahan

Pada tahun 2005, penggunaan lahan untuk persawahan masih cukup luas sekitar 2.648 Ha dan tahun 2014 berkurang menjadi 1.907,49 Ha. Hal ini terjadi karena minat masyarakat pada tanah pertanian semakin

meningkat untuk dijadikan sebagai tanah kosong yang nantinya digunakan untuk pemukiman, pertokoan maupun perindustrian. Penyebab lainnya adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman dan perumahan.

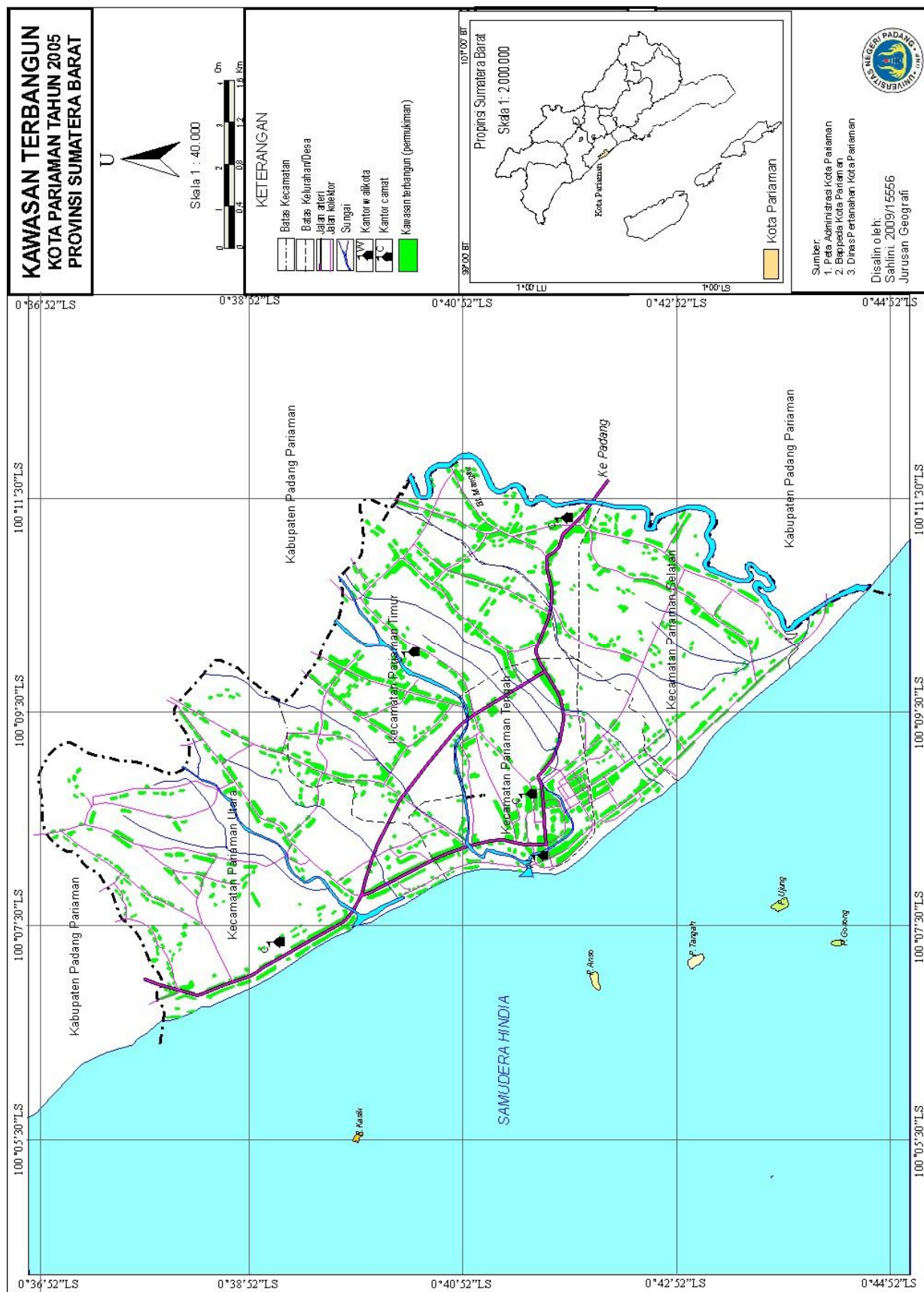
2) Penggunaan Lahan Pekarangan dan Bangunan (Perumahan, Sekolah, Industri)

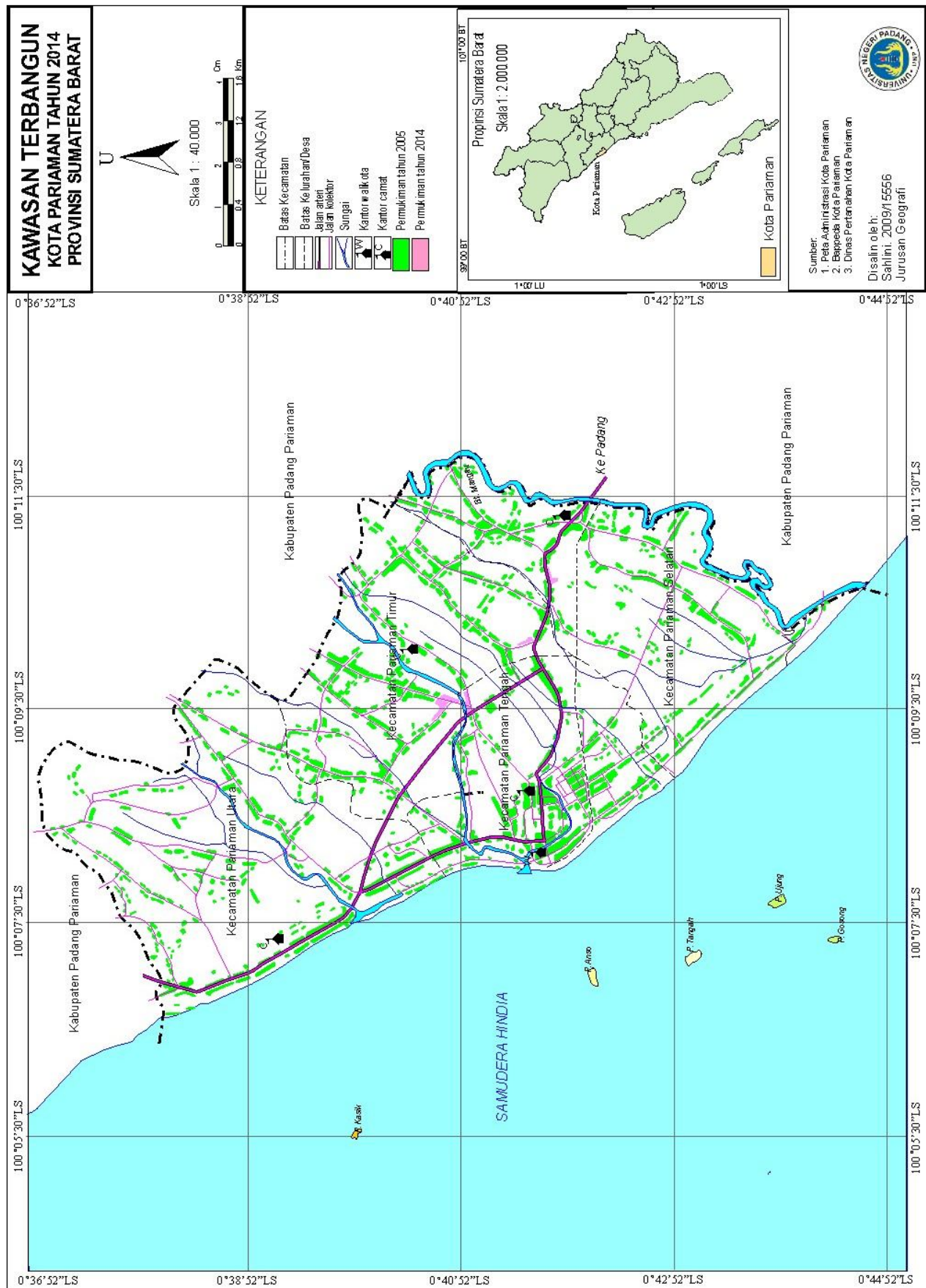
Penggunaan lahan untuk persawahan terus mengalami penyempitan, namun berbeda sebaliknya dengan penggunaan lahan pekarangan dan bangunan seperti perumahan, sekolah, dan kawasan industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan luasan. Pada tahun 2008 lahan pekarangan dan bangunan sekitar 7.526,00 Ha. Pada tahun 2009 sekitar 7.538 Ha atau mengalami perluasan sebesar 12 Ha dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 sekitar 6.042,46 Ha (36,12%) atau mengalami penyempitan sebesar 1.495,54 Ha dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2011 sekitar 12.739 Ha (76,14%) atau mengalami perluasan sebesar 6.696,54 Ha dari tahun sebelumnya.

Dari informasi yang telah diuraikan di atas dapat diindikasikan bahwa permintaan lahan di Kota Pariaman mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang membeli lahan untuk kawasan pemukiman, pertokoan, maupun industri sehingga mengakibatkan terjadinya revitalisasi transportasi di Kota Pariaman yang menjadikan aksesibilitas semakin dimudahkan. Hal ini terlihat semakin banyaknya pemukiman, petokoan dan industri di sebelah kiri jalan di Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil analisis peta penggunaan lahan Kota Pariaman tahun 2005 dan 2014 serta pengamatan secara langsung di lapangan, maka diperoleh pola persebaran penggunaan lahan untuk lahan terbangun berupa permukiman Kota Pariaman beserta luasnya.

Pola persebaran penggunaan lahan untuk lahan terbangun berupa permukiman pada tahun 2005 didominasi oleh pola memanjang jaringan jalan wilayah Kecamatan Pariaman Tengah. Peningkatan luas pola ini disebabkan karena pada wilayah ini terdapat pusat pemerintahan Kota Pariaman sehingga pemusatan pembangunan sarana dan prasarana berada di wilayah ini. Selanjutnya, analisis data menemukan bahwa peningkatan lahan terbangun untuk permukiman sesuai dengan pola memanjang jaringan sungai.





B. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data dari hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa :

Pertama: tipologi kekotaan dilihat dari jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai tahun 2014, kota Pariaman termasuk kota kecil. jumlah penduduk Kota Pariaman sebelum menjadi otonomi daerah menjadi Kota Pariaman, tahun 1998 penduduk kota sebesar 71.882 jiwa, tahun 1999 penduduk kota sebesar 70.147 jiwa, tahun 2000 penduduk kota sebesar 69.084 jiwa, tahun 2001 sebesar 71.472 jiwa dan tahun 2002 71.827 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pariaman setelah menjadi otonomi daerah menjadi Kota Pariaman, tahun 2003 penduduk kota sebesar 73.456 jiwa, tahun 2004 penduduk kota sebesar 75.406 jiwa, tahun 2005 berjumlah 77.006 jiwa, tahun 2006 berjumlah 77.201 jiwa, tahun 2007 berjumlah 77.480 jiwa, tahun 2008 sebesar 78.474 jiwa dan tahun 2009 sebesar 78.552 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pariaman setelah menjadi otonomi daerah menjadi Kota Pariaman dan dipecah menjadi 4 kecamatan, tahun 2010 penduduk kota sebesar 79.653 jiwa, tahun 2011 penduduk kota sebesar 80.711 jiwa, tahun 2012 berjumlah 81.806 jiwa, tahun 2013 berjumlah 82.636 jiwa dan tahun 2014 sebesar 83.610 jiwa.

Kedua, tipologi kekotaan dilihat dari kepadatan penduduk Kota Pariaman 2014, kepadatan penduduk didapatkan 3 kecamatan termasuk kepadatan rendah yaitu kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara dan 1 kecamatan termasuk kepadatan tinggi yaitu Kecamatan Pariaman Tengah.

Ketiga, tipologi kekotaan dilihat dari fungsi kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, kota Pariaman berfungsi sebagai kota pendidikan, kota jasa dan kota wisata.

Keempat, tipologi kekotaan dilihat dari struktur kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, struktur ekonomi berdasarkan PDRB termasuk kota pertanian, karena sektor pertanian merupakan aktivitas ekonomi paling menonjol di Kota Pariaman, baik tahun 2004-2005 maupun tahun 2013-2014

Kelima, tipologi kekotaan dilihat dari pola perkembangan Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, pola memanjang jaringan jalan wilayah Kecamatan Pariaman Tengah. Peningkatan luas pola ini disebabkan karena pada wilayah ini terdapat pusat pemerintahan Kota Pariaman sehingga pemusatan pembangunan sarana dan prasarana berada di wilayah ini. Selanjutnya, analisis data menemukan bahwa peningkatan lahan terbangun untuk permukiman sesuai dengan pola memanjang jaringan sungai.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan tentang tipologi kekotaan Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Tipologi kekotaan dilihat dari jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 1998 sampai tahun 2014, kota Pariaman termasuk kota kecil
2. Tipologi kekotaan dilihat dari kepadatan penduduk Kota Pariaman 2014, kepadatan penduduk didapatkan 3 kecamatan termasuk kepadatan rendah yaitu kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara dan 1 kecamatan termasuk kepadatan tinggi yaitu Kecamatan Pariaman Tengah
3. Tipologi kekotaan dilihat dari fungsi kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, kota Pariaman berfungsi sebagai kota pendidikan, kota jasa dan kota wisata.
4. Tipologi kekotaan dilihat dari struktur kota Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, struktur ekonomi berdasarkan PDRB termasuk kota pertanian, karena sektor pertanian merupakan aktivitas ekonomi paling menonjol di Kota Pariaman, baik tahun 2004-2005 maupun tahun 2013-2014
5. Tipologi kekotaan dilihat dari pola perkembangan Kota Pariaman tahun 1998 sampai 2014, pola memanjang jaringan jalan wilayah Kecamatan

Pariaman Tengah. Peningkatan luas pola ini disebabkan karena pada wilayah ini terdapat pusat pemerintahan Kota Pariaman sehingga pemusatan pembangunan sarana dan prasarana berada di wilayah ini. Selanjutnya, analisis data menemukan bahwa peningkatan lahan terbangun untuk permukiman sesuai dengan pola memanjang jaringan sungai.

B. Saran

1. Bagi pemerintah kota Pariaman, untuk dapat mengembangkan fungsi lain kota, karena letak kota Pariaman strategis.
2. Bagi pemerintah Kota Pariaman untuk mencermati struktur kota sehingga perkembangan kota menjadi seimbang.
3. Diharapkan kepada pemerintah kota untuk memperhatikan perkembangan kota 10 tahun terakhir sebagai pedoman pengembangan kota pada masa yang akan datang.
4. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan tipologi perkotaan dari variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakaruddin. 2006. *Pengantar Geografi Desa dan Kota*. Padang: UNP Press
- Bintarto, R dan Surastopo Hadisumarno. 1995. *Metode Analisa Geografi*, LP3ES Yogyakarta
- Daljoneni. 2003. *Geografi Kota Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Hermon, Dedi dkk. 2008. *Metode dan Teknik Penelitian Geografi Tanah*. Yayasan Jihadul Khair Center : Padang
- Mulyadi. S. 2011. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawi, Marnis. 1991. *Metodologi Penelitian*. IKIP Padang
- Nuraini, Cut. 2004. *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Poerdarminta, W.J.S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2007. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Geografi Pembangunan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang: CV. Media Brilian.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah, edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widagdo. 2005. *Desain dan Kebudayaan*. Bandung: Penerbit ITB

Perundangan-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2007 tentang *Panduan Teknis Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2008 tentang *Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan*

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Skripsi/Jurnal

Asridha, Rizky Putri S. Hutagalung. 2014. Psikologi Kepribadian I. *Pusat Bahan Ajar dan eLearning Universitas Mercu Buana*

Dwi Ari, I.R dan Antariksa. 2005. Studi Karakteristik Pola Permukiman di Kecamatan Labang Madura. *Jurnal ASPI vol. 4 No. 2 April 2005*

Faisal, Gun. 2014. Tipologi Pintu Rumah Tradisional Dusun Pucung, Situs Manusia Purba Sangiran. *Jurnal: Fakultas Teknik, Universitas Riau*

Hidayatun, Maria Immaculata. 2004. Pengaruh Tatahan Masyarakat Terhadap Tata Ruang Kota. <http://www.petra.ac.id>

Nurfansyah. 2012. Tipologi Kawasan Jalan Pageran Antasari Banjarmasin. *Info Teknik. Volume 13 No. 1 Juli 2012*

Sasongko, Ibnu, 2005, Pembentukan Ruang Permukiman Berbasis Budaya Ritual, *Disertasi Doktorat Arsitektur, FTSP, Pascasarjana ITS, Surabaya*.

Tutuko, Pindo. 2003. Ciri Khas Arsitektur Rumah Belanda (studi kasus rumah tinggal di Pasuruan), *Jurnal Arsitektur Mintakat, Vol. 2 No. 1, September*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25171
Telp. (0751) 7055671 Fax (0751) 7055671
e-mail: info@fis.unp.ac.id Web: <http://fis.unp.ac.id>



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2008
Cert.No. 01.100.117125

Nomor : 2345/UN35.1.6/LT/2015

12 Agustus 2015

Hal : **Izin penelitian**

Yth. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kota Pariaman
di
Pariaman

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang tersebut di bawah ini :

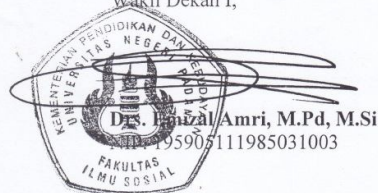
No.	Nama	BP/NIM	Prodi	Jenjang Program
1.	Sahlini	2009/15556	Geografi NK	S1

kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut di atas, untuk melakukan penelitian di Kota Pariaman pada bulan Agustus s.d September 2015.

Judul Skripsi *“Tipologi Tingkat Kekotaan Kota Pariaman”*.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diaturkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Ketua Jurusan Geografi
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Nasri Nasar No. 1 Pariaman Telp/Fax. 0751-93938

REKOMENDASI

Nomor : 070/ 580 /KKPol/VIII-2015

Tentang :

Izin Melaksanakan Penelitian

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman setelah membaca dan mempelajari :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian;
3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
4. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor : 234/UN35.1.6/LT/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Mohon Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian di Kota Pariaman yang diadakan oleh :

Nama	: Sahlini
NIM/BP	: 2009/15556
Alamat	: Bungo Tanjung Kec. Pariaman Timur
Maksud Penelitian	: Penyusunan Skripsi
Lama Penelitian	: Agustus s.d September 2015
Judul Penelitian/Survey	: "Tipologi Tingkat Kekotaan Kota Pariaman"
Lokasi Penelitian	: Kota Pariaman

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian kepada pejabat instansi terkait, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Mengirim laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Pariaman c/q Kantor Kesbangpol Kota Pariaman;
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Pariaman, 18 Agustus 2015

**At. KAKAN KESBANGPOL
KOTA PARIAMAN**
Kasubag TU

H. IRYON SE. MM
NIP. 19650323 198602 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman sebagai laporan
2. Kepala BAPPEDA Kota Pariaman
3. Kepala Dinas DIKPORA Kota Pariaman
4. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman
6. Perguruan Tinggi Ybs
7. Saudara ybs



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Nasri Nasar No. 1 Pariaman Telp/Fax. 0751-93938

REKOMENDASI

Nomor : 070. 423/ KKPol/V-2015

Tentang :

Izin Pengambilan Data

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman setelah membaca dan mempelajari :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Permendagri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian;
3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Surat dari Dekan Universitas Negeri Padang Fakultas Ilmu Sosial Nomor : 1746/UN35.1.6/LT/2015 tanggal 21 Mei 2015 , perihal Pengambilan Data .

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Pengambilan Data di Kota Pariaman yang dilakukan oleh :

Nama	: SAHLINI
BP/NIM	: 2009/15556
Alamat	: Bungo Tanjung
Dalam rangka	: Pembuatan Proposal Skripsi
Lama	: 2 (dua) Minggu
Tempat/Lokasi	: - Dinas Pendidikan Dan Olah Raga Kota Pariaman - BAPPEDA Kota Pariaman - PLN Kota Pariaman
Anggota rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian;
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian kepada pejabat instansi terkait, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian;
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat;
4. Mengirim laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Pariaman c/q Kantor Kesbangpol Kota Pariaman;
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Pariaman, 25 Mei 2015
An. KAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PARIAMAN
Kasi HAL
H. ZULKARNAIN, SPd
NIP. 19580902 198303 1005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman sebagai laporan
2. Bapak Kepala Dinas Dikpora Kota Pariaman
3. Bapak Kepala BAPPEDA Kota Pariaman
4. Sdr. Pimpinan PLN Kota Pariaman
5. Perguruan Tinggi Ybs
6. Saudara ybs